



RENCANA KERJA (RENJA) 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. SOEKARNO-HATTA NO.35 (69116)

TLP/FAX 031-3094179

Email : diskominfo@bangkalankab.go.id

B A N G K A L A N

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan hasil Review Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 - 2026 dan juga merupakan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bangkalan No. 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang memuat berbagai kebijakan dan program kegiatan dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini disamping sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 juga memuat *review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian pada tahun berjalan juga sebagai dasar perencanaan awal.

Akhirnya kami menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Renja ini, saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan dalam penyusunan dokumen selanjutnya.

Bangkalan, 31 Agustus 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN**



Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 198703 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	30
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun	37
BAB V PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Sebagai dokumen perencanaan tahunan dokumen ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Dokumen Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dalam perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renja yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renja PD
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

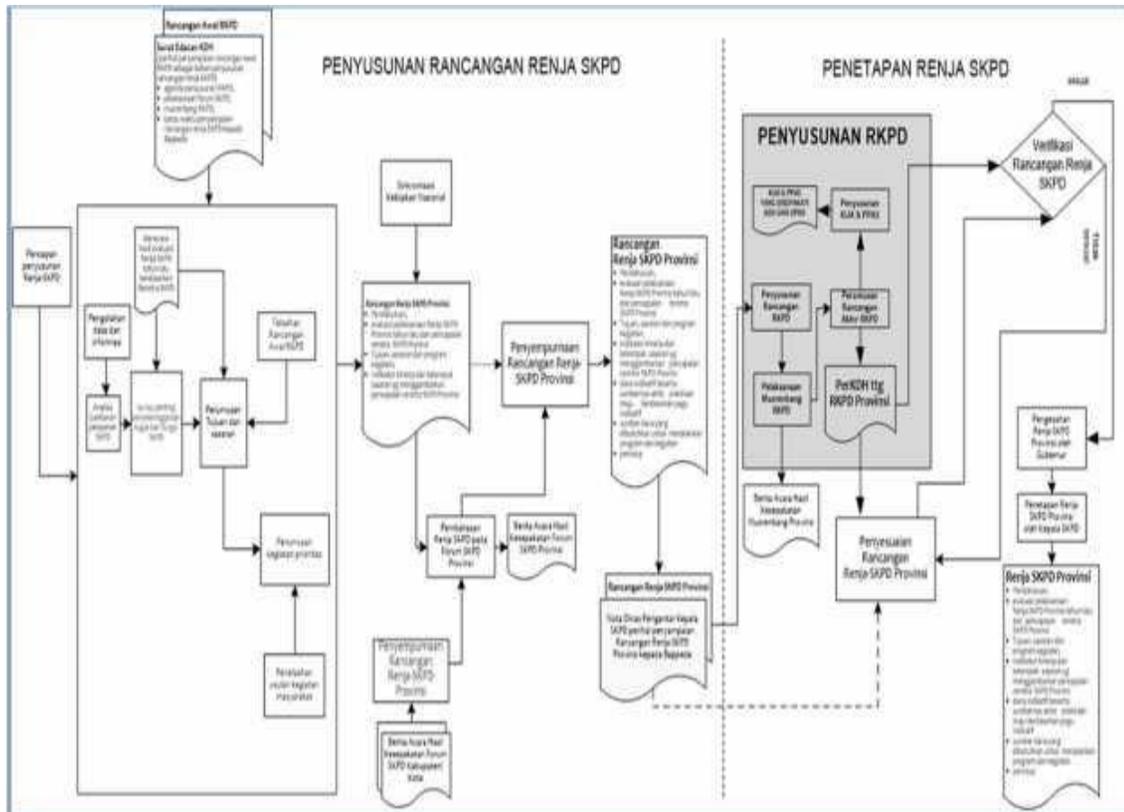
- c. Penyusunan Rancangan Renja PD
- d. Perumusan Rancangan Akhir
- e. Penetapan

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Persyaratan penyusunan RAPBD melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini:



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahn serta tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);

12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27/E);
14. Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan yang sudah dilaksanakan pada perencanaan tahun 2023 dan melanjutkan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Tahun 2024. Disamping itu untuk menyusun rencana skala prioritas dan plafon anggaran tahun 2024 serta untuk mewujudkan pembangunan daerah berkesinambungan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Perkiraan Maju Tahun 2025

5. BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra

Rencana Kerja adalah penjabaran rencana strategis menjadi program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik. Rencana Kerja menyajikan dasar pengukuran kinerja dan sasaran yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun (n-2) dan perkiraan target tahun berjalan (n-1).

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan s/d Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan KepMendagri 050-3708 Th.2020												
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	70%						70%			
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sistem jaringan intra pemerintah daerah	3	kegiatan					3	kegiatan		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah website resmi yang dikelola	2	website/PD	2	2	2	100%	2	website/PD	6	300%
		jumlah jaringan yang terpasang	1	paket	1	1	1	100%	1	paket	3	300%
		jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan	250	menara telekomunikasi	150	200	200	100%	210	menara telekomunikasi	560	224%

2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi aplikasi tnde	2	kegiatan					2	kegiatan		
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang tersedia	1	aplikasi	0	0	0	#DIV/0!			0	0%
		sosialisasi aplikasi tnde	216	orang	72	72	72	100%			144	67%
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	1	aplikasi					1	aplikasi	1	100%
		Jumlah sosialisasi yang diadakan	1	kegiatan					1	kegiatan	1	100%
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase pengamanan informasi persandian	80%						80%			
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kemanan informasi	1	kegiatan					1	kegiatan		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	JUMLAH OPERASIONAL PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI	9	jenis	3	0	0	#DIV/0!			3	33%
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH SDM BIDANG KEAMANAN INFORMASI	540	orang	180	0	0	#DIV/0!			180	33%
		Jumlah lisensi keamanan website				1	1				1	#DIV/0!

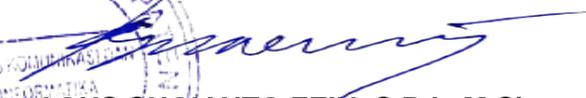
		jumlah perangkat keamanan yang dihasilkan				1	1				1	#DIV/0!
		Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	61	PD					61	PD	61	100%
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase jumlah berita yang dipublikasikan	100%						100%			
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	kegiatan					4	kegiatan		
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi	210	orang	65	85	85	100%			150	71%
		jumlah media luar ruang yang dikembangkan dan dipelihara	9	media	3	3	3	100%			6	67%
		Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	1	dokumen					1	dokumen	1	100%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah siaran keliling, penyebaran brosur disebarakan	-			-	-				#VALUE!	#VALUE!
		jumlah kebijakan yang diinformasikan pada masyarakat	-			-	-				#VALUE!	#VALUE!
		jumlah lensa madura yang diterbitkan	36	bulan	12	12	12	100%			24	67%
		jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio	36	bulan	12	12	12	100%			24	67%
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12	dokumen					12	dokumen	12	100%
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	jumlah issue yang berhasil diangkat	36	kali	12	12	12	100%			24	67%
		jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti	36	kali	12	12	12	100%			24	67%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	12	dokumen					12	dokumen	12	100%
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	operasional komisi informasi	12	bulan	12	12	12	100%	12	buah	36	300%

2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase jumlah data statistik sektoral yang dihasilkan	60%					60%				
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah/ Kabupaten Kota	3	kegiatan					3	kegiatan		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah data dan statistik daerah yang tersajikan	6	dokumen	2	1	1	100%			3	50%
		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1	dokumen					1	dokumen	1	100%
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah komunitas relawan TIK	151	orang	45	0	0	#DIV/0!			45	30%
		Jumlah aparatur peserta pelatihan survey	45	orang	0	-	-	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!
		jumlah operator data statistik yang dilatih	0			61	61				61	#DIV/0!
		Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	61	orang					61	orang	61	100%
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	jumlah operator TIK yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	183	skpd	61	0	0	#DIV/0!			61	33%
		jumlah aparatur yang memahami tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	183	skpd	61	61	61	100%			122	67%

		Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	61	orang					61	orang	61	100%
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	85%						85%			
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%						100%			
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4	dokumen	4	4	4	100%	4	dokumen	12	300%
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	dokumen	1	1	1	100%	1	dokumen	3	300%
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	dokumen	1	1	1	100%	1	dokumen	3	300%
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	dokumen	1	1	1	100%	1	dokumen	3	300%
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	dokumen	1	1	1	100%	1	dokumen	3	300%
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	laporan	1	1	1	100%	1	laporan	3	300%
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1	laporan	1	1	1	100%	1	laporan	3	300%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%						100%			
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	63	org/bln	51	54	54	100%	54	org/bln	159	252%

2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	laporan	1	1	1	100%	1	laporan	3	300%
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	66	laporan	66	66	66	100%	66	laporan	198	300%
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%				100%					
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14	laporan	14	14	14	100%	14	laporan	42	300%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%				80%					
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	paket	4	5	5	100%	12	paket	21	175%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	paket	1	2	2	100%	12	paket	15	125%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	paket	1	1	1	100%	12	paket	14	117%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	paket	2	1	1	100%	1	paket	4	400%
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	dokumen	6	5	5	100%	12	dokumen	23	192%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	laporan	100	50	50	100%	50	laporan	200	400%

2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%						80%			
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	2	2	2	100%	1	laporan	5	500%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	laporan	3	3	3	100%	3	laporan	9	300%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	laporan	5	5	5	100%	5	laporan	15	300%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	80%						80%			
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	21	unit	21	21	21	100%	21	unit	63	300%
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	unit	1	3	3	100%	3	unit	7	233%
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25	unit	2	2	2	100%	25	unit	29	116%


**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 198703 1 012

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangkalan termasuk Tipe B (Sekretariat dan 3 Bidang) dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi:

Sub Koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Aplikasi Informatika membawahi:

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik membawahi:

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika terkait Urusan pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan Pemerintahan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangkalan melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

a. Tugas :

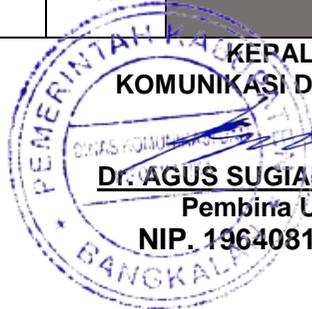
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan daerah bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang Komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan

No.	Indicator kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra (%/Th)				Realisasi Capaian (%/Th)		Rasio Capaian (%/Th)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah											
a	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah			60	70			82.51				
2	Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah											
a	Persentase jumlah berita dipublikasikan			90	100			56.22				
3	Tersedianya statistik daerah											
a	Prosentase Jumlah data statistik sektoral yang dihasilkan			55	60			29				
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik											
a	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					18	20					
2	Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat											
a	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik					100	100					
b	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah					22	44					
c	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					22	50					


KERALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si
 Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 198703 1 012

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1 Perangkat Daerah yang baru terbentuk

Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan berdiri berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah seiring berjalannya waktu tentunya ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti halnya prasarana dan sumber daya yang handal.

2.3.2 Keterbatasan SDM

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan adalah Institusi yang membawahi 3 (Tiga) Urusan Pemerintah di daerah yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan Persandian Negara dan operasional website. Dari sejumlah 61 Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan hanya 35% yang memenuhi kualifikasi tersebut. Komposisi Kepegawaian tersebut sangat mengganggu terhadap pencapaian Kinerja Organisasi secara maksimal

2.3.3 Keterbatasan Sarana dan Prasarana Teknis

Salah satu sub urusan pemerintah bidang Kominfo adalah aplikasi informatika. Sub urusan ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di daerah agar menerapkan teknologi informasi atau penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan baik pelayanan administrasi sesama instansi pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi ini dibutuhkan dukungan infrastruktur baik berupa instalasi jaringan, *hardware* maupun *software*. Sarana dan prasarana teknis ini menjadi dasar bagi terbangunnya sistem informasi yang terkoneksi antara Dinas Komunikasi dan Informatika selaku

pengelola domain resmi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan sub domain yang di kelola oleh masing masing perangkat daerah. Sistem yang ada saat ini koneksi antar OPD masih berbasis *wireless* sehingga rentan terhadap gangguan. Sementara sistem informasi terkini membutuhkan kecepatan, keakuratan dan kapasitas pengiriman data yang memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam setiap penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika selalu dilakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Program dan Kegiatan yang ada sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, namun karena adanya keterbatasan anggaran dari APBD Kabupaten Bangkalan, harus dilakukan penyesuaian program dan kegiatan pada tahun 2024. Selanjutnya program dan kegiatan ini diharapkan mampu mendukung tercapainya visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Adapun *review* terhadap rancangan RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Keptmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	18%	1,800,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	18%	1,800,000,000	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	18%	1,800,000,000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	18%	1,800,000,000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah	3 Unit	1,800,000,000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah	3 Unit	1,800,000,000	
			Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan					Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan			
			Jumlah website resmi yang dikelola					Jumlah website resmi yang dikelola			
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%	250,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%	250,000,000	

	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	18%	250,000,000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	18%	250,000,000	
	pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	250,000,000	pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	250,000,000	
			Jumlah sosialisasi yang diadakan					Jumlah sosialisasi yang diadakan			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	Tingkat keamanan informasi pemerintah	22%	40,390,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	Tingkat keamanan informasi pemerintah	22%	40,390,000	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD	22%	40,390,000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD	22%	40,390,000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	61 PD	40,390,000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	61 PD	40,390,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100%	1,480,814,000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100%	1,730,814,000	

	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi	100%	1,480,814,000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi	100%	1,730,814,000	
	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah		Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	1 dokumen	750,000,000	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah		Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	1 dokumen	1,000,000,000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	374,664,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	374,664,000	
	Pelayanan informasi publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 dokumen	6,150,000	Pelayanan informasi publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 dokumen	6,150,000	
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 dokumen	350,000,000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 dokumen	350,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	22%	15,300,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	22%	15,300,000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kegiatan statistik di lingkup PD	22%	15,300,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kegiatan statistik di lingkup PD	22%	15,300,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	5,250,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	5,250,000	
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	61 orang	4,800,000	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	61 orang	4,800,000	

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	61 orang	5,250,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	61 orang	5,250,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	85%	6,610,350,402	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	85%	6,624,554,487	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	24,358,449	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	24,358,449	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5,017,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5,017,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3,293,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3,293,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3,692,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3,692,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3,370,449	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3,370,449	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3,356,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3,356,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	3,692,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	3,692,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1,937,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1,937,500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	4,895,645,402	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	4,930,549,487	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 org/bln	4,890,869,402	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 org/bln	4,925,773,487	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3,776,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3,776,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66 laporan	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66 laporan	1,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	800,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	800,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	800,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	800,000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	80%	6,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	80%	6,000,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	128 paket	1,000,000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	128 paket	1,000,000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	2,500,000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	2,500,000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 orang	2,500,000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 orang	2,500,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	63,705,050	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	63,705,050	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	6,114,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	6,114,800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	14,970,250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	14,970,250	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	6,575,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	6,575,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10,535,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10,535,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4,860,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4,860,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	20,650,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	20,650,000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	80%	2,910,052	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	80%	2,910,052	
	Pengadaan mebel		Jumlah mebel yang diadakan	1 unit	1,000,000	Pengadaan mebel		Jumlah mebel yang diadakan	1 unit	1,000,000	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	2 Unit	1,910,052	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	2 Unit	1,910,052	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	1,496,046,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	1,475,346,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	312,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	312,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	1,177,546,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	1,156,846,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	80%	120,885,449	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	80%	120,885,449	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 unit	100,985,449	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 unit	100,985,449	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	8,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	8,500,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	11,400,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	11,400,000	



**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640814 198703 1 012

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah :

- a. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
- b. Meningkatnya cakupan wilayah yang melayani penyiaran digital
- c. Meningkatnya konektivitas layanan pos
- d. Terwujudnya konektivitas *Next Generation* Nasional
- e. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan infomatika
- f. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
- g. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
- h. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
- i. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- j. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan:

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
- b. Meningkatnya pelayanan penyebaran informasi yang tepat dan akurat
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika

Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah selaras dengan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan serta mendukung sasaran yang hendak dicapai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia walaupun sasaran yang ingin dicapai lebih luas dan kompleks.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk membangun sebuah rencana sebagai pedoman dalam menyusun program dan indikator kinerja 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang dilimpahkan. Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Diskominfo Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diuraikan diatas terkait dengan Renstra, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

“ Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi”

Sedangkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan adalah Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan berintegritas Tinggi. Dimana sasaran yang ingin dicapai dari misi tersebut adalah pelaksanaan kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, sidang statistik dan bidang persandian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut adalah meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah:

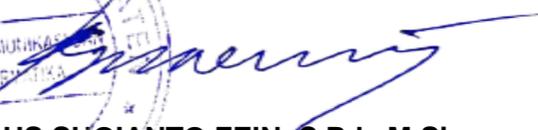
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
- Meningkatkan pelayanan penyebarluasan informasi yang tepat dan akurat
- Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada Renja tahun 2024 tertuang dalam tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	target		Uraian	Indikator Kinerja	target		
		2024	2025			2024	2025	
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,5 B	2,75 B	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%	20%	
				Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	100%	
					Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	22%	44%	
					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	22%	50%	

				Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Nilai Sakip PD	60%	61%	
					Indeks kepuasan masyarakat	85%	87%	


**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640814 198703 1 012

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD
- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan mebel
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah
 - Pengelolaan media komunikasi publik
 - Pelayanan informasi publik
 - Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelegaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
 - Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

Tabel 3.2
Strategi dan Kebijakan Program/Kegiatan Perangkat Daerah

Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan layanan publik yang diselenggarakan secara online serta mengembangkan aplikasi yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data	1. Mengoptimalkan layanan publik yang berbasis elektronik dan pengembangan aplikasi oleh PD
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup dan meningkatkan diseminasi informasi melalui media informasi	2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam keterbukaan informasi dan meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang keterbukaan informasi publik
3. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada PD	3. Standard keamanan informasi bagi PD
4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	4. Mengoptimalkan ketersediaan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi Kab. Bangkalan	5. Mengoptimalkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kab. Bangkalan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Tahun 2025

Program merupakan kumpulan Kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan bertugas membantu Bupati dalam urusan Pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Untuk mendukung tugas tersebut maka ditetapkan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah
- Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan mebel
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah
- Pengelolaan media komunikasi publik
- Pelayanan informasi publik
- Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelegaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

- Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi tata statistik sektoral

- Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
- Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tersaji pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	18%	1,800,000,000			18%	1,800,000,000
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		18%	1,800,000,000			18%	1,800,000,000
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah		3 Unit	1,800,000,000	DAUM		3 Unit	1,800,000,000
		Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan			-				
		Jumlah website resmi yang dikelola			-				
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	18%	250,000,000			18%	200,000,000
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		18%	250,000,000			18%	200,000,000
2.16.03.2.02.07	pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		2 Unit	250,000,000	DAUM		2 Unit	200,000,000
		Jumlah sosialisasi yang diadakan			-				

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	22%	40,390,000			22%	40,390,000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD		22%	40,390,000			22%	40,390,000
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		61 PD	40,390,000	DAUM		61 PD	40,390,000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	100%	1,730,814,000			100%	1,430,814,000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi		100%	1,730,814,000			100%	1,430,814,000
2.16.02.2.01.03	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah		1 dokumen	1,000,000,000	DAUM		1 dokumen	900,000,000
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		12 dokumen	374,664,000	DAUM		12 dokumen	174,664,000
2.16.02.2.01.09	Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		12 dokumen	6,150,000	DAUM		12 dokumen	6,150,000
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		12 dokumen	350,000,000	DAUM		12 dokumen	350,000,000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	22%	15,300,000			22%	15,300,000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan statistik di lingkup PD		22%	15,300,000			22%	15,300,000

2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		1 dokumen	5,250,000	DAUM		1 dokumen	5,250,000
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		61 orang	4,800,000	DAUM		61 orang	4,800,000
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		61 orang	5,250,000	DAUM		61 orang	5,250,000
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	85%	6,624,554,487			85%	6,685,350,402
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	24,358,449			100%	24,358,449
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	5,017,000	DAUM		2 dokumen	5,017,000
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	3,293,500	DAUM		1 dokumen	3,293,500
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	3,692,000	DAUM		1 dokumen	3,692,000
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	3,370,449	DAUM		1 dokumen	3,370,449
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	3,356,000	DAUM		1 dokumen	3,356,000
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 laporan	3,692,000	DAUM		1 laporan	3,692,000

2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 laporan	1,937,500	DAUM		1 laporan	1,937,500
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	100%	4,930,549,487			100%	4,930,645,402
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		63 org/bln	4,925,773,487	DAUM		63 org/bln	4,925,869,402
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	3,776,000	DAUM		1 laporan	3,776,000
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		66 laporan	1,000,000	DAUM		66 laporan	1,000,000
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	100%	800,000			100%	800,000
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		14 laporan	800,000	DAUM		14 laporan	800,000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	80%	6,000,000			80%	6,000,000
2.16.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		128 paket	1,000,000	DAUM		128 paket	1,000,000
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		1 orang	2,500,000	DAUM		1 orang	2,500,000
2.16.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		1 orang	2,500,000	DAUM		1 orang	2,500,000

2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	80%	63,705,050			80%	63,705,050
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 paket	6,114,800	DAUM		12 paket	6,114,800
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 paket	14,970,250	DAUM		12 paket	14,970,250
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	6,575,000	DAUM		12 paket	6,575,000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	10,535,000	DAUM		1 paket	10,535,000
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 dokumen	4,860,000	DAUM		12 dokumen	4,860,000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 laporan	20,650,000	DAUM		50 laporan	20,650,000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	80%	2,910,052			80%	2,910,052
2.16.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan		1 unit	1,000,000	DAUM		1 unit	1,000,000
2.16.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan		2 Unit	1,910,052	DAUM		2 Unit	1,910,052
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	80%	1,475,346,000			80%	1,536,046,000
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	6,500,000	DAUM		1 Laporan	6,500,000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 laporan	312,000,000	DAUM		3 laporan	312,000,000

2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 laporan	1,156,846,000	DAUM		5 laporan	1,217,546,000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kantor Diskominfo Kab. Bangkalan	80%	120,885,449			80%	120,885,449
2.16.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		21 unit	100,985,449	DAUM		21 unit	100,985,449
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	8,500,000	DAUM		3 unit	8,500,000
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25 unit	11,400,000	DAUM		25 unit	11,400,000


**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 198703 1 012

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat *Community Base Development* (CBD). Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*.

Output Rencana Kerja adalah **Program Tahunan** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program. Selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024. Renja juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan rencana selanjutnya.

Semoga dokumen rencana kerja Dinas ini mampu mengantarkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Bangkalan.

Bangkalan, 31 Agustus 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN**


Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640814 198703 1 012